

13. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, tahun 2025 diarahkan pada tema: “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan.

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021– 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, dokumen perencanaan lingkup nasional dan regional, serta tindak lanjut dalam proses penyusunan KUPPAS dan RAPBD Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan periode sebelumnya serta mempertimbangkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini akan tersusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja juga dimaksudkan sebagai parameter dalam memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sekaligus sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen

perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUA/PPAS Tahun 2024, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025 dan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Serta sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika;
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, serta penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK menguraikan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.
- BAB V PENUTUP, berisikan catatan penting dengan menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2023;

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2023 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dapat diketahui dari pengukuran kinerja dan pengukuran keuangan pada tahun sebelumnya. Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar tahun lalu (tahun 2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas Komuninkasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar s/d Tahun 2024 Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Tujuan 1 : Meningkatkan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	2,81	2,82	3,68	130%	3,2	9,69	2,808696
	SASARAN 1: Meningkatkan layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100	90	94	94	100%	98	278	2,78
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	100	86.66	90	100	111%	92,89	279,55	2,7955
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domaina pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100	100	100	1	1%	100	201	2,01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	24	7	6	6	100%	6	19	0,791667
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	1	1	3	300%	2	6	0,857143
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	63	60	3	90	3000%	20	170	2,698413
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	12	93	93	100%	96	201	2,01
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	0	1	1	100%	1	2	0,5
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	0	1	1	100%	1	2	0,5
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	5	1	1	100%	1	7	1,75
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	11	1	2	1	50%	3	5	0,454545
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	8	0	1	1	100%	1	2	0,25
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8	6	2	2	100%	2	10	1,25
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	7	1	1	1	100%	2	4	0,571429
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	7	2	1	1	100%	2	5	0,714286
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan	4	3	1	3	300%	1	7	1,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
2.16.03.2.02.001 1	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4	1	1	1	100%	1	3	0,75
	SASARAN 2: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	100	76	86	88.69	103%	91	255,69	2,5569
		Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%					100%		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100	83	85 70	85 70	100%	90	258 80	2,58 0,8
			100	60				80		
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		89		45,5	45,8	101%	57	102,8	1,155056
2.16.02.2.01.000 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	8	3	1	1	100%	2	6	0,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	5	4	4	100%	4	13	1,083333
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	48	12	12	12	100%	12	36	0,75
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2080	500	510	510	100%	520	1530	0,735577
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	34	11	11	11	100%	11	33	0,970588
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	28	5	5	5	100%	12	22	0,785714
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5650	995	1000	1000	100%	1100	3095	0,547788
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12	12	15	15	100%	1	28	2,333333
2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	4	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	160	30	30	30	100%	30	90	0,5625

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.001 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	320	0	80	80	100%	80	160	0,5
	SASARAN 3: Meningkatnya Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100	100	100	100	100	98		
		Indeks Pembangunan Statistik	3,1					2,7		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	100	100	95,07	100	105%	96,71	296,71	2,9671
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100	3	100	100	100%	100	203	2,03
2.20.02.2.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	14	1	5	6	120%	3	10	0,714286
2.20.02.2.01.000 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu	40	27	14	30	214%	10	67	1,675

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Statistik Daerah yang Terintegrasi								
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	72	1	1	12	1200%	4	17	0,236111
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	20	1	8	8	100%	4	13	0,65
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	4	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	4	24	20	28	140%	1	53	13,25
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	SASARAN 4: Meningkatkan Keamanan Informasi	Indeks KAMI	69,77	39.4	46,51	46.8		54,26		
2.21.02..	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69,77	39,402	46,51	46,8	101%	64,26	150,4618	2,15654
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	60,77	39,3991919327539	46,51	47,8	103%	54,26	141,4592	2,32778

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	1	8	8	100%	1	10	2,5
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18	1	6	6	100%	4	11	0,611111
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	9	1	3	3	100%	2	6	0,666667
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	82	1	20	35	175%	20	56	0,682927
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	100	25	35	35,2	101%	50	110,2	1,102
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	140	1	20	35	175%	40	76	0,542857

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	TUJUAN 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 88,75					A 86,25		
	SASARAN 5 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 88,75	84,82	85	85,27		A 86,25		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Baik (79-84)	84,09	Baik (79-84)	85,64		Baik (79-84)		
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44	11	11	13	118%	11	35	0,795455
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	7	7	7	100%	7	21	0,75
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	1	2	200%	1	5	1,25
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	5	13	13	100%	13	31	0,596154
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	6	4	4	100%	4	14	0,875
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	249	68	68	68	100%	65	201	0,807229
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350	4	50	50	100%	100	154	0,44
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	16	4	4	100%	4	24	1,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		3	3	100%	3	6	0,5
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	5	5	100%	5	30	1,5
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1140	995	36	36	100%	36	1067	0,935965
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	6	1	1	100%	1	8	2
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	3	24	24	100%	24	51	0,53125
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	37	36	36	100%	36	109	0,751724
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	2	36	36	100%	36	74	0,513889

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52		13	13	100%	13	26	0,5
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	9	8	8	100%	8	25	0,78125
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	8	8	6	75%	9	23	0,676471
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	8	1	1	100%	1	10	2,5
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	8	2			2	10	1,25
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2	100			100	102	1,02
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9					3	3	0,333333

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	6	0			6	12	0,5

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Diskominfo Tahun 2024 Kota Blitar, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
 - b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
 - c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
 - d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 6 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

- e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
 - c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Adanya Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi
 - d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 1 kegiatan pada Program Program Informasi dan Komunikasi Publik semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Program Informasi dan Komunikasi Publik telah mencapai 100%.

- e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut :

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Program Informasi dan Komunikasi Publik, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.

3. Program Aplikasi Informatika

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
- d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 2 kegiatan pada Program Aplikasi Informatika semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Aplikasi Informatika telah mencapai 100%.

- e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan Program Aplikasi Informatika, ke depan dilakukan perbaikan pelaksanaan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Data statistik sektoral dapat dikumpulkan sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai bank data Kota Blitar .
 - Meningkatnya koordinasi pro aktif dengan OPD terkait di OPD yang belum mengumpulkan data statistik sektoral

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 1 kegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar harus tetap dijaga dan terus ditingkatkan kinerjanya dengan program-program yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Harapannya dengan kinerja yang lebih baik dan program-program yang lebih tepat sasaran, Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar dapat naik lebih signifikan dan dapat mencapai target RPJMD tahun 2021-2026. Beberapa program atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar adalah dengan sinkronisasi dan koordinasi dengan aplikasi SIPD terkait penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
 - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
 - Penyelenggaraan bimbingan teknis penilaian mandiri keamanan informasi perangkat daerah menggunakan indeks KAMI.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 2 kegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, ke depan dilakukan Beberapa program atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar adalah dengan melakukan bimbingan teknis, desk atau pendampingan terkait peningkatan nilai capaian Indeks Kami.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator -indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar menangani urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Terkait hal tersebut Dinas Kominfotik berkewajiban memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai IKU PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Gambaran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pencapaian target pelayanan PD tahun 2022 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

N O	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catata n
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Analisi s
1	2	3	4		6	7	8	8		9	10	11	12	13
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan			96	97	100	100	100	100	100	25	100	100	
	Indeks Pembanunan Statistik					2,7	2,9	3,1				2,9	3,1	
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)													
	Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	100		100	100	

N O	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catata n
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Analisi s
1	2	3	4		6	7	8	8		9	10	11	12	13
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan			83	85	90	95	100	83	85		95	100	
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah			60	70	80	90	100	60	70		90	100	
3	Program Aplikasi Informatika													
	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik			86,35	90,00	92,89	95,00	100	100	90		95,00	100	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral													
	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik			93,43	95,07	96,71	98,35	100	100	100		98,35	100	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi													
	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			38,76	46,51	64,26	62,02	69,77	59,3	46,80		62,02	69,77	

Berdasarkan table 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama Persentase layanan publik online dan terintegrasi merupakan periode pertama penghitungan di awal Renstra tahun 2021-2026. Dengan Target di Tahun 2023 sebesar 94% dan terealisasi sebesar 94 % dengan persentase sebesar 100%, kriteria sangat baik
2. Indikator Kinerja Utama Nilai hasil PPID dengan target 86 % pada tahun ini terealisasi 88,69 % persentase sebesar 103 % baik.
3. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo dengan target 100 % dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik , hal ini menunjukkan bahwa internet di seluruh Perangkat Daerah sudah dapat diakses guna mendukung giat atau operasional pada bidang IT. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu adanya koordinasi dan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Kunci Presentase layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 89 % dan terealisasi 90 % dengan kriteria sangat baik , hal ini menunjukkan bahwa internet di seluruh Perangkat Daerah sudah dapat diakses guna mendukung giat atau operasional pada bidang IT. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar.
4. Indikator Kinerja Kunci Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar dengan target 45,5 % dan terealisasi 45,8 % dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media social sehingga diseminasi informasi kepada Masyarakat mudah terserap.
5. Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan dengan target 97 % pada tahun ini terealisasi 100 % persentase sebesar 104.16 %. Dikarenakan Data Statistik Sektoral sudah terkumpul sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai Bank Data Kota Blitar.
6. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik. Menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mempublikasikan data statistik sektoral
7. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik. Menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya

sarana prasarana yang memadai dalam mempublikasikan data statistik sektoral

8. Indikator Kinerja Utama Indeks KAMI dengan target 46,51% dan terealisasi 46,8 % dengan kriteria sangat baik.
9. Indikator Kinerja Kunci Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan target 46,51% dan terealisasi 46,8 % dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang penilaian mandiri keamanan informasi menggunakan Indeks KAMI

2.3 Isu- Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik, urusan bidang persandian yang harus diselesaikan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sebagai berikut:

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :

- Perlunya peningkatan pengembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintahan yang sepenuhnya terdigital untuk mewujudkan smart city di Kota Blitar
- Perlunya peningkatan pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;
- Perlunya peningkatan pengembangan pemanfaatan layanan Data center untuk meningkatkan keamanan dan integrasi data serta interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar;
- Perlunya peningkatan pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
- Belum optimalnya pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ;
- Belum optimalnya pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

2. Urusan Bidang Statistik

Belum optimalnya peningkatan pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;

3. Urusan Bidang Persandian

Perlunya peningkatan pengembangan pelayanan persandian dan keamanan informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2025 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	95 Persen	5.700.316.310,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	95 Persen	5.635.316.310,00	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100 Persen	573.714.904,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100 Persen	70.990.004,00	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	11 Dokumen	573.714.904,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	70.990.004,00	
	Pengelolaan E-government di	Kota Blitar,	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan	98 persen	5.126.601.406,00	Pengelolaan E-government di	Kota Blitar,	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan	98 persen	5.564.326.306,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kepanjen Kidul	dan layanan publik			Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kepanjen Kidul	dan layanan publik			
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	238.928.611,00	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	531.023.911,00	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	20 Perangkat Daerah	4.887.672.795,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	5.033.302.395,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	90 Persen 95 Persen	2.539.304.140,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	90 Persen 95 Persen	2.513.252.886,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan					pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	68,5 Persen	2.539.304.140,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	68.5 Persen	2.513.252.886,00	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	279.003.900,00	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	278.902.086,00	
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1112 Permohonan	1.435.546.786,00	Pelayanan Informasi Publik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	700 Permohonan	566.991.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	16 Rekomendasi	20.397.534,00	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomendasi	51.285.500,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	533 Media	723.823.680,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	1.582.733.500,00	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	110 Orang	80.532.240,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	80 Orang	33.340.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	98,31 Persen	340.838.700,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	98.31 Persen	306.400.700,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	100 Persen	340.838.700,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	100 Persen	306.400.700,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota	jen Kidul	dari BPS			Kabupaten/Kota	jen Kidul	dari BPS			
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	7 Persentase	137.905.300,00	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	90 Persentase	70.814.500,00	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	14	113.824.800,00	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80 Persentase	205.469.200,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	89.108.600,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	30.117.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62,02 Persen	256.283.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62.02 Persen	247.600.400,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	62.02 Persen	205.203.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	62.02 Persen	196.528.400,00	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	75.400.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	66.598.700,00	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	49.608.000,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	49.446.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	39.965.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	40.253.200,00	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	21 Perangkat Daerah	40.230.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	21 Perangkat Daerah	40.230.000,00	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	75 Persen	51.080.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	75 Persen	51.072.000,00	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 Perangkat Daerah	51.080.000,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 Perangkat Daerah	51.072.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kota Blitar, kepanjen	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 indeks	5.239.852.896,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kota Blitar, kepanjen	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 indeks	6.223.617.972,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jen Kidul				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jen Kidul				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 persen	24.494.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 persen	17.828.778,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Unit	24.494.700,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Unit	6.278.778,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 persen	237.059.290,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 persen	3.500.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Unit	87.661.790,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Unit	8.050.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai standart	100 persen	20.139.150,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai standart	100 persen	4.529.010.785,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Dokumen	5.239.150,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Dokumen	4.527.010.785,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 persen	237.059.290,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 persen	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	2 Unit	74.250.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	2 Unit	131.486.439,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Unit	75.147.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Unit	33.186.439,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	20.139.150,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	98.300.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7 Laporan	10.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7 Laporan	288.464.775,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.900.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.636.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		116.790.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	10.020.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65 Paket	24.790.400,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65 Paket	23.306.900,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, kepanjen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Orang	92.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, kepanjen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Orang	46.015.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kidul					Kidul				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	3.994.465.046,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	5.800.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	33/13 orang/bulan	3.987.165.046,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Orang/bulan	4.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	7.300.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	190.685.675,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 persen	296.515.310,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 persen	84.480.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket	9.700.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket	84.480.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Blitar,	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	3 Paket	13.012.310,	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Blitar,	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	3 Paket	935.287.905	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah	kepanjen Kidul	sesuai standart		00	Pemerintahan Daerah	kepanjen Kidul	sesuai standart		,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Paket	27.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Paket	687.641.905,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Paket	51.125.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Paket	247.646.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	1 Paket	5.800.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	1 Paket	237.059.290,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Dokumen	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Dokumen	87.661.790,00	

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Laporan	185.878.000 ,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Laporan	75.147.500, 00	
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	100 persen	550.389.000 ,00	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	100 persen	74.250.000, 00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 ini tidak terdapat usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD

Tabel. 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Blitar

No .	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	1	2	3	4	5	6
		NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
 - a. Transformasi ekonomi
 - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
 - ✓ Penguatan infrastruktur digital
 - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi
 - ✓ Percepatan infrastruktur IKN
 - b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
 - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
SDM berdaya saing dan produktif, melalui
 - a. Transformasi sosial
 - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
 - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
 - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
 - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
 - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
 - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
 - b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
 - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
 - ✓ Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
 - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
 - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
 - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
 - ✓ Peningkatan produksi industri pengolahan
 - ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
 - ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial

Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu

- (1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
 - a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
 - b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
 - c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
 - d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
 - (2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
 - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
 - b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics*
 - c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
 - e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
 - f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja
 - (3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
 - a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
 - b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
 - c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
 - d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
 - e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu

- (1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
 - a. Penguatan industri dasar
 - b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
 - c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
 - d. Pengembangan industri medium-high technology
 - e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
 - f. Produktivitas UMKM dan koperasi
 - g. Pengembangan ekonomi biru
 - h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
 - i. Peningkatan produktivitas BUMN
 - j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
 - k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
 - l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
 - m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- (2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
 - a. Percepatan transisi energi
 - b. Ekonomi sirkular industri
 - c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)
 - d. Pengelolaan hutan lestari
- (3) Transformasi digital, melalui:
 - a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
 - b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
 - c. Pemerintah digital
 - d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital
- (4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
 - a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
 - b. Optimalisasi backbone integrasi ekonomi

- c. Perkuatan system logistic nasional
- d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global
- e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- (5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
 - a. Wilayah metropolitan
 - b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
 - c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan
- 3. Transformasi Tata Kelola
 Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:
 - (1) Bidang regulasi, melalui:
 - a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
 - b. Penguatan tata kelola regulasi
 - (2) Pelayanan publik, melalui:
 - a. Digitalisasi pelayanan publik
 - b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
 - c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
 - d. Perluasan akses pelayanan publik
 - (3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
 - a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
 - b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
 - c. Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah
 - (4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
 - a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
 - b. Penguatan tata kelola ASN
 - c. Penggajian tunggal ASN
 - d. Reformasi system pension
 - e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material
 - (5) Pengawasan pembangunan, melalui:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
 - c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
 - d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha
 - e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
 - f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
 - g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 - h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
 - (6) Partai politik, melalui:
 - a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
 - b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik
- 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 - (1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
 - a. Pembangunan bidang hukum
 - b. Pembangunan bidang keamanan
 - c. Pembangunan bidang demokrasi

- (2) Stabilitas ekonomi makro
 - a. Optimalisasi pendapatan negara
 - b. Peningkatan kualitas belanja negara
 - c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
- (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
- 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
 - a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
 - b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
 - (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
 - a. Penguatan ketahanan keluarga
 - b. Peningkatan kesetaraan gender
 - c. Perwujudan masyarakat inklusif
 - (3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
 - a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
 - d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
 - (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
 - a. Kemandirian pangan
 - b. Peningkatan ketahanan air nasional
 - c. Ketahanan energi
 - (5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
 - a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
 - b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025 dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar 2021-2026. Tujuan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan indikator tujuan yang disusun adalah Indeks SPBE. Target Kinerja dari Indikator Tujuan yang ingin di capai tahun 2025 adalah sebesar 4,20

SASARAN

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Maka sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata Kelola TIK
2. Meningkatnya system keterbukaan informasi public
3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah
4. Meningkatnya keamanan informasi
5. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar yaitu Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Tahun 2023 terealisasi 3,68 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu dengan target 2,82. sehingga mulai Tahun 2024-2026 targetnya tujuannya dinaikkan melebihi dari target yang ada di perubahan renstra ketiga, dengan harapan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar akan terus meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar sebagai berikut:

Table 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8
	Tujuan 1 :Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penilaian SPBE dilakukan oleh KemenpanRB dan di dalamnya terdapat 4 domain yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot dan nilai tingkat kematangan masing-masing dalam penilaian SPBE	2,82	3,68	3,9	4,25*	4,35*
	Sasaran 1 : Meningkatkan layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	94%	94 %	94,3%	100%	100%
	Sasaran 2 : Meningkatkan sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar	86	88.69	91	96	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan n Realisasi Tahun 2024	Target	
				Targe t	Realisas i		2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8
			Layanan Informasi Publik					
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	SP4N Lapor adalah layanan yang mewadahi aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang sehingga aspirasi atau pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti pihak terkait.	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Perencanaa OPD : Dokumen Renja Evaluasi Pembangunan : Dokumen LKJIP	97%	100 %	100%	100% *	100%
		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik : Ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	N/A	2,7	2,9	3,1
	Sasaran 4 : Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Nilai Per Area Keamanan Informasi : 7 Area Keamanan 1. Tata kelola 2. Pengelolaan Resiko 3. Kerangka Kerja	46.51	46.8	54,26	62,02	69,77

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8
			4.Pengelolaan Aset 5.Teknologi 6.Suplemen 7.Katagori SE					
	Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Peragkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 85	A 85.27	A 86,43	A 87,5	A 88,75
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 85	A 85.27	A 86,43	A 87,5	A 88,75

*Target dinaikkan karena realisasi di tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2023

3.2 Program dan Kegiatan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan pada pencapaian program nasional, pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar, pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informasi, peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik dan pencapaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Program dan Kegiatan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2023 berdasarkan hasil pemetaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang direncanakan sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	Kemiskinan/stanting/P3DN
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemiskinan/stanting/P3DN
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	P3DN
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	P3DN
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kemiskinan/stanting/P3DN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	P3DN
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	stunting
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase implementasi Persandian Untuk	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen IKM yang disusun/dokumen x 100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, DAN STATISTIK KOTA BLITAR

4.1 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Dinas
Komunikasi, Informatika Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	• Mensosialisasikan arsitektur proses bisnis dan layanan sistem elektronik sesuai indikator yang ada di SPBE. • Menyusun standar manajemen layanan mulai dari pelayanan pengguna hingga pengoperasian layanan tersebut. Sosialisasi standar teknis pengembangan aplikasi	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawaasaan E-Gov dalam penyelenggaraan Pemda Kab/Kota
2	Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	• Optimalisasi dukungan perangkat daerah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. • Mengadakan rapat koordinasi dan monev atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi. • Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran keterbukaan informasi publik	- Program Informasi Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	• Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektorl pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan pada perangkat daerah. • Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi.	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektorl - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorl di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorl
4	Meningkatnya Keamanan Informasi.	• Pendampingan dan Asistensi Indeks KAMI dan Manajemen Risiko SPBE perangkat daerah yang menjadi objek penilaian yang memperoleh nilai rendah. • Memberikan rekomendasi pada perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian Indeks KAMI	- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja - Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian kebijakan, strategi, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja - Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.2 Rencana Program Kerja Tahun 2025

Pada tahun anggaran tahun 2025 ini, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar menyesuaikan dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam perubahan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar 2021 – 2026.

Program yang disusun berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu. Ditetapkan untuk dipedomani, dijabarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Total kebutuhan dana / pagu indikatif pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 14.256.188.268,00 . Adapun program / kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2025 diuraikan secara rinci pada Tabel 4.1 tentang Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				14.896.188.268,00				14.568.575.116,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.896.188.268,00				14.568.575.116,00
	2	1 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.342.187.168,00				13.992.036.816,00
1	2	1 6	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 indeks	6.223.617.972,00			84 indeks	5.794.278.260,00
	2	1 6	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		100 persen	17.828.778,00			100 persen	20.050.000,00
	2	1 6	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	11 Dokumen	6.278.778,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		11 Dokumen	6.500.000,00
	2	1 6	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	7 Laporan	3.500.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		7 Laporan	4.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	2	1	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	1 Laporan	8.050.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Laporan	9.050.000,00
	2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai standart	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 persen	4.529.010.785,00			100 persen	4.389.558.260,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	13 Orang/bulan	4.527.010.785,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		13 Orang/bulan	4.386.758.260,00
	2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	4 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	2.800.000,00
	2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 persen	131.486.439,00			100 persen	135.200.000,00
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	65 Paket	33.186.439,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		65 Paket	35.200.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan							
	2	1	0	2.0	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 Orang	98.300.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		100 Orang	100.000.000,00
	2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 persen	288.464.775,00			100 persen	302.816.610,00
	2	1	0	2.0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	4 Paket	8.636.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Paket	9.000.000,00
	2	1	0	2.0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	3 Paket	10.020.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		3 Paket	11.613.310,00
	2	1	0	2.0	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	5 Paket	23.306.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		5 Paket	24.000.000,00
	2	1	0	2.0	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	36 Paket	46.015.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		36 Paket	47.537.500,00
	2	1	0	2.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	1 Paket	5.800.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Paket	6.000.000,00
	2	1	0	2.0	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	24 Dokumen	4.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		24 Dokumen	4.200.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Perundang-undangan	Perundang-undangan yang Disediakan							
	2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	36 Laporan	190.685.675,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		36 Laporan	200.465.800,00
	2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 persen	84.480.000,00			100 persen	94.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	3 Unit	84.480.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		3 Unit	94.000.000,00
	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 persen	935.287.905,00			100 persen	593.594.100,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	36 Laporan	687.641.905,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		36 Laporan	325.667.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	13 Laporan	247.646.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		13 Laporan	267.927.100,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
	2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 persen	237.059.290,00			100 persen	259.059.290,00
	2	1	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	8 Unit	87.661.790,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		8 Unit	97.661.790,00
	2	1	0	2.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	8 Unit	75.147.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		8 Unit	85.147.500,00
	2	1	0	2.0	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	2 Unit	74.250.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Unit	76.250.000,00
2	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	90 Persen 95 Persen	2.513.252.886,00			90 Persen 95 Persen	2.544.714.340,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
							pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan							
	2	1	0	2.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	68.5 Persen	2.513.252.886,00			68.5 Persen	2.544.714.340,00
	2	1	0	2.0	001	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	5 Komunitas	278.902.086,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		5 Komunitas	288.131.840,00
	2	1	0	2.0	001	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	700 Permohonan	566.991.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		700 Permohonan	575.616.760,00
	2	1	0	2.0	001	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	5 Rekomendasi	51.285.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		5 Rekomendasi	54.142.034,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
	2	1	0	2.0	002	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	6 Media	1.582.733.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		6 Media	1.592.633.706,00
	2	1	0	2.0	002	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	80 Orang	33.340.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		80 Orang	34.190.000,00
3	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik		95 Persen	5.635.316.310,00			95 Persen	5.653.044.216,00
	2	1	0	2.0		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 Persen	70.990.004,00			100 Persen	75.564.210,00
	2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	4 Dokumen	70.990.004,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Dokumen	75.564.210,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa								
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	98 persen	5.564.326.306,00			98 persen	5.577.480.006,00
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	2 Aplikasi	531.023.911,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Aplikasi	538.928.611,00
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	30 Perangkat Daerah	5.033.302.395,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		30 Perangkat Daerah	5.038.551.395,00
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				306.400.700,00				319.730.300,00
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Data statistik yang terpublikasi		98.31 Persen	306.400.700,00			98.31 Persen	319.730.300,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
						STATISTIK SEKTORAL	menggunakan sistem elektronik							
	2	2	0	2.0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	100 Persen	306.400.700,00			100 Persen	319.730.300,00
	2	2	0	2.0	000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	90 Persentase	70.814.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		90 Persentase	73.905.500,00
	2	2	0	2.0	000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	80 Persentase	205.469.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		80 Persentase	211.824.800,00
	2	2	0	2.0	001	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	1 Dokumen	30.117.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Dokumen	34.000.000,00
	2	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				247.600.400,00				256.808.000,00
5	2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi		62.02 Persen	247.600.400,00			62.02 Persen	256.808.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
						PENGAMANAN INFORMASI	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	2	2	0	2.0		Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota		62.02 Persen	196.528.400,00			62.02 Persen	203.288.000,00
	2	2	0	2.0	000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	1 Dokumen	66.598.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Dokumen	70.000.000,00
	2	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	4 Laporan	49.446.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	50.808.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025				Target	Pagu Indikatif (Rp)
	2	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	2 Laporan	40.253.200,00	PENDAPATA N BAGI HASIL		2 Laporan	42.050.000,00
	2	2	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	21 Perangkat Daerah	40.230.000,00	PENDAPATA N BAGI HASIL		21 Perangkat Daerah	40.430.000,00
	2	2	0	2.0		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi		75 Persen	51.072.000,00			75 Persen	53.520.000,00
	2	2	0	2.0	000	Operasionalisa si Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Blitar, Kepanjenkidul , Sentul	30 Perangkat Daerah	51.072.000,00	PENDAPATA N BAGI HASIL		30 Perangkat Daerah	53.520.000,00
	J U M L A H									14.896.188.268,00				14.568.575.116,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik tahun 2025 sebagai penjabaran Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai bagian dari proses pelaksanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan seluruh program

dan kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan tepat sasaran , tepat waktu , tepat anggaran dan administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya . Misi ke-5 Wali Kota Blitar Terpilih periode 2021-2026 yang diemban oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berbasis Teknologi Informasi ”.

Misi ke-5 Wali Kota Blitar dijabarkan menjadi tujuan/sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas adalah “Meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” Dan tujuan akhirnya untuk mewujudkan Kota Blitar sesuai dengan visi “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT “